LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DAN LUARAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

DI SUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di Program Studi Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB). Keberadaan institusi pendidikan tinggi hukum tidak hanya dituntut untuk mencetak akademisi yang handal secara teoretis, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan hukum, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Latar belakang penyusunan laporan ini didasarkan pada urgensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta dokumentasi yang sistemokratis terhadap seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai melalui skema hibah internal maupun eksternal. Dalam konteks pembangunan hukum nasional dan regional, dinamika masyarakat pascatambang, sengketa agraria, perlindungan hak-hak nelayan, kesadaran hukum masyarakat, hingga penerapan prinsip-prinsip *blue economy* menuntut adanya intervensi keilmuan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, keterlibatan dosen Program Studi Sarjana Hukum dalam skema hibah internal UBB menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan misi universitas yang unggul, berintegritas, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program PkM di Program Studi Sarjana Hukum dirancang secara terstruktur dengan mengintegrasikan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) serta metode yang berorientasi pada pemecahan masalah empiris di lapangan. Melalui hibah internal universitas, para dosen didorong untuk mengaplikasikan keahlian hukum mereka—baik di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum internasional—ke dalam bentuk penyuluhan, pendampingan kelompok rentan, mediasi sengketa, penyusunan rancangan regulasi desa, hingga peningkatan kesadaran hukum sadar lingkungan.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, transparansi, serta akuntabilitas institusional kepada para pemangku kepentingan

(*stakeholders*). Evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan hibah internal ini diharapkan mampu memetakan tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun substantif di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas luaran PkM di masa mendatang.

1.2 Tujuan Pelaksanaan PkM dan Monev

1. Mengukur tingkat ketercapaian sasaran program pengabdian masyarakat yang berbasis pada penerapan disiplin ilmu hukum.
2. Mengevaluasi kesesuaian implementasi kegiatan dengan standar manajemen proyek pengabdian.
3. Meninjau realisasi luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan oleh tim pelaksana.
4. Memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efisiensi dan dampak positif PkM di masa mendatang.

BAB II

HASIL PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

2.1 Rekapitulasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Internal UBB Tahun 2024

Secara institusional, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan pilar ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan data rekapitulasi internal institusi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB Tahun Anggaran 2023, dari total keseluruhan 99 proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen dari berbagai fakultas di lingkungan universitas, sebanyak 80 proposal dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan pendanaan hibah internal.

Dalam konstelasi perolehan tersebut, Fakultas Hukum UBB turut berpartisipasi aktif dengan mencatatkan perolehan total 5 (lima) judul proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Keberhasilan ini merefleksikan antusiasme serta daya saing para dosen di lingkungan fakultas hukum dalam merumuskan agenda intervensi sosial yang solutif.

Distribusi perolehan hibah ini menegaskan bahwa tradisi riset dan pengabdian di Fakultas Hukum UBB tidak hanya bertumpu pada satu program studi saja, melainkan terbangun secara sinergis lintas jenjang pendidikan. Sinergi ini memperkuat posisi fakultas sebagai institusi pencetak sarjana hukum yang peka terhadap persoalan riil di tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Daftar Dosen dan Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Penerima Hibah Internal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Berikut adalah daftar dosen dilingkup bidang hukum yang menerima pendanaan hibah internal beserta skema dan alokasi dana final:

1. **Toni, S.H., M.H**
    - **Judul:** Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bahari Desa Benteng Kota
    - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU)
    - **Dana Final:** Rp. 14.000.000
2. **Rafiqa Sari, S.H., M.H**

- **Judul:** Pengembangan *Self-Efficacy* Melalui Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja di SMA Negeri 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur.
- **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU)
- **Dana Final:** Rp. 15.000.000

3. **Darwance, S.H., M.H**
   - **Judul:** Penanaman Karakter Milenial Bangka Selatan Sebagai Generasi Sadar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU)
   - **Dana Final:** Rp. 12.000.000
4. **Bunga Permatasari, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Tumbak Petar Guna Perlindungan Legalitas Usaha
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTU)
   - **Dana Final:** Rp. 12.000.000
5. **Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Pemilih Pemula Milenial Cerdas (Cermat, Egaliter, Rasional, Damai, Aktif, Sadar Hukum) Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang berkulitas di Kabupaten Belitung Timur.
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF)
   - **Dana Final:** Rp. 14.000.000
6. **Ndaru Satrio, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Pembentukan Kepribadian Anti Korupsi Siswa SMP N 4 Manggar
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF)
   - **Dana Final:** Rp. 15.000.000
7. **Reza Andriantika Suntara, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Penguatan Nasionalisme Generasi Z Pada Era Disrupsi Sebagai Upaya Peningkatan Nilai-Nilai Karakter Bangsa di SMA Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTJ)
   - **Dana Final:** Rp. 11.000.000
8. **Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Optimalisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah SMP di Toboali Kabupaten Bangka Selatan
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTJ)
   - **Dana Final:** Rp. 11.000.000
9. **Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.**
   - **Judul:** Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pelajar
   - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTJ)
   - **Dana Final:** Rp. 9.000.000

2.3 Kontribusi dan Proyeksi ke Depan Rekapitulasi Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Rekapitulasi perolehan hibah internal tahun 2025 ini memberikan gambaran yang jelas bahwa peta jalan (*roadmap*) pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum UBB telah bergerak ke arah yang tepat, yakni berorientasi pada pemecahan masalah konkret (*problem-solving oriented*) dan berbasis kebutuhan masyarakat (*evidence-based community service*).

Keterlibatan dosen-dosen senior maupun pengajar muda dalam skema ini menunjukkan adanya regenerasi dan pemerataan semangat pengabdian. Setiap rupiah dana hibah yang dikelola, baik melalui skema PMTU maupun PMTJ, telah melalui tahapan pertanggungjawaban administratif, pelaporan kemajuan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) secara ketat oleh tim reviewer internal LPPM UBB.

Ke depan, rekapitulasi data pelaksanaan PkM ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif tahunan semata, melainkan akan diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen pengembangan kurikulum program studi. Hasil temuan lapangan, studi kasus permasalahan hukum di desa mitra, serta modul-modul pendampingan yang telah disusun oleh para dosen akan ditransformasikan menjadi bahan ajar berbasis klinis hukum (*clinical legal education*). Dengan demikian, akumulasi pengalaman dari kelima program pengabdian ini diharapkan mampu memperkaya kualitas proses belajar mengajar di ruang-ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta memperkokoh kontribusi nyata institusi bagi pembangunan hukum di daerah.

BAB III

EVALUASI LUARAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2024 tidak ditempatkan sekadar sebagai kegiatan seremonial penyerapan anggaran, melainkan sebagai instrumen strategis yang terukur tingkat akuntabilitas dan dampaknya. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan proposal yang disetujui serta memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat mitra, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB menerapkan mekanisme pengawasan berjenjang. Mekanisme ini berpuncak pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara daring yang melibatkan tim reviewer internal dari unsur Guru Besar dan Lektor Kepala yang memiliki kredibilitas tinggi di bidangnya, antara lain Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.

Proses evaluasi ini dirancang untuk memotret realitas di lapangan secara objektif. Tim reviewer tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif semata, tetapi juga mendalami substansi intervensi hukum yang diberikan oleh para dosen kepada kelompok sasaran. Evaluasi difokuskan pada tiga pilar utama, yakni: (1) ketepatan sasaran dan relevansi program dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) tingkat realisasi luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam kontrak penugasan; serta (3) identifikasi kendala di lapangan guna merumuskan langkah tindak lanjut (*action plan*) yang konstruktif dan solutif.

Capaian luaran dari kelima program PkM dosen Fakultas Hukum UBB Tahun Anggaran 2025 dievaluasi secara ketat berdasarkan komitmen kontrak pendanaan internal. Secara garis besar, realisasi luaran diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. **Luaran Wajib (Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir):** Sebagian besar tim pelaksana telah diarahkan dan menunjukkan progres yang signifikan dalam menyelesaikan draf laporan akhir. Tim reviewer memberikan catatan agar sistematika penulisan laporan disesuaikan dengan standar baku panduan LPPM UBB, mencakup kedalaman analisis data lapangan, dokumentasi kegiatan yang memadai, serta transparansi pertanggungjawaban keuangan.
2. **Luaran Publikasi Ilmiah:** Para dosen pelaksana diwajibkan untuk mendiseminasikan hasil pengabdian mereka ke dalam bentuk artikel jurnal ilmiah pengabdian kepada

masyarakat atau prosiding seminar nasional. Berdasarkan hasil monev, draf artikel ilmiah dari masing-masing tim telah memasuki tahap finalisasi substansi, dengan fokus pada narasi penerapan metode klinis hukum di masyarakat.

3. **Luaran Tambahan (Modul, Panduan, dan HKI):** Beberapa tim pelaksana berhasil menghasilkan luaran tambahan yang bernilai strategis, berupa draf modul penyuluhan hukum desa, panduan praktis pengurusan NIB, serta naskah akademik rancangan pengaturan lokal. Luaran tambahan ini diproyeksikan tidak hanya berhenti sebagai arsip kegiatan, tetapi dirancang agar dapat diintegrasikan langsung ke dalam perangkat pembelajaran mata kuliah di Program Studi Sarjana Hukum.

Evaluasi menyeluruh ini menyimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum UBB Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar kualitas institusional yang ditetapkan. Rekomendasi utama dari hasil monev menekankan perlunya kelembagaan dan keberlanjutan program (*sustainability plan*). Desa-desa yang telah menjadi lokasi binaan—seperti Desa Simpang Rimba, Desa Tugang, Desa Kemingking, Desa Damar, dan Desa Penyampak—diharapkan tidak terputus hubungannya setelah pendanaan hibah berakhir. Fakultas Hukum UBB berkomitmen menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai laboratorium hukum hidup (*living law laboratory*), di mana kerja sama riset, magang mahasiswa, dan pengabdian lanjutan dapat terus dikembangkan secara berkesinambungan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, rekapitulasi data, serta hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan hibah Pengabdian kepada Masyarakat internal UBB Tahun Anggaran 2024 di lingkungan bidang hukum telah berjalan dengan sangat baik, tertib, dan akuntabel. Fakultas Hukum UBB berhasil mencatatkan perolehan dan pengelolaan sebanyak 5 (lima) judul proposal pengabdian yang didanai melalui skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) dan skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ). Keterlibatan dosen-dosen dari unsur Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum mencerminkan pemerataan serta tingginya komitmen institusional dalam menerjemahkan tridharma perguruan tinggi ke dalam kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.

Kedua, evaluasi realisasi luaran menunjukkan bahwa para tim pelaksana telah memenuhi komitmen akademik dan administratif yang dipersyaratkan. Sebagian besar kegiatan telah menghasilkan luaran wajib berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, draf artikel publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat, serta luaran tambahan berupa modul penyuluhan hukum dan panduan praktis yang bernilai aplikatif. Kendala-kendala di lapangan yang bersifat teknis—seperti penyesuaian jadwal koordinasi dengan mitra dan adaptasi pelaporan keuangan—telah berhasil diatasi melalui pendekatan komunikasi yang komunikatif serta pendampingan intensif.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan lapangan, dinamika pelaksanaan, serta hasil evaluasi menyeluruh dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas, keberlanjutan (*sustainability*), dan dampak positif kegiatan di masa mendatang:

1. **Peningkatan Kuantitas dan Perluasan Skema Partisipasi Dosen:** Disarankan agar Fakultas Hukum UBB terus mendorong peningkatan partisipasi aktif dosen dalam kompetisi hibah pengabdian internal maupun eksternal pada tahun anggaran berikutnya. Perluasan jangkauan wilayah mitra dapat diarahkan pada skema desa binaan tematik yang terintegrasi secara lintas bidang keilmuan, sehingga kehadiran institusi di tengah masyarakat dapat dirasakan secara lebih masif dan komprehensif.
2. **Hilirisasi Hasil PkM ke dalam Kurikulum Berbasis Klinis Hukum:** Rekomendasi penting berikutnya adalah memperkuat proses hilirisasi hasil-hasil pengabdian lapangan agar ditransformasikan menjadi modul ajar yang berperspektif klinis hukum (*clinical legal education*). Kasus-kasus riil, problem hukum agraria, persoalan legalitas UMKM, dan dinamika paralegal desa yang ditemukan oleh dosen di lapangan harus diintegrasikan langsung ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait. Langkah ini akan memperkaya metode pembelajaran interaktif di ruang kuliah, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori normatif semata, tetapi juga mengkaji praktik penegakan hukum empiris di masyarakat.
3. **Penguatan Kelembagaan Mitra Binaan Menjadi Laboratorium Hukum Hidup:** Desa-desa yang telah menjadi lokasi PkM pada tahun 2025—seperti Desa Simpang Rimba, Desa Tugang, Desa Kemingking, Desa Damar, dan Desa Penyampak—sebaiknya tidak diputus hubungan kerja samanya setelah masa hibah berakhir. Fakultas Hukum UBB perlu merintis nota kesepahaman lanjutan untuk menjadikan desa-desa tersebut sebagai laboratorium hukum hidup (*living law laboratory*), yang secara berkesinambungan dapat dimanfaatkan sebagai basis riset lanjutan, lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta pusat konsultasi hukum bagi masyarakat daerah.